

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN
RETRBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Tesis

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S – 2**

**Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi
Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**



Martani Setyawati

NIM : S 4209022

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh
MARTANI SETYAWATI
S4209022

Telah disetujui oleh Pembimbing
Pada Tanggal :

Pembimbing I



Prof. Dr. Tulus Harvono, SE, MEK
NIP. 19550801 198103 1 006

Pembimbing II



Izza Mafruhah, SE, MSi
NIP. 19720323 200212 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Ekonomi pembangunan






Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh
MARTANI SETYAWATI
S4209022

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada Tanggal :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. JJ. Sarungu, MS	1. 
Pembimbing Utama	Prof. Dr. Tulus Haryono, SE, MEk	2. 
Pembimbing Pendamping	Izza Mafruhah, SE, MSi	3. 


Prof. Dr. Sarungu, M. Sc., PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Ekonomi
pembangunan


Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : MARTANI SETYAWATI

NIM : S4209022

Program Studi : Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Minat Utama : Keuangan Daerah Dan Perencanaan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam tesis ini dan disebutkan sebagai Daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta,



tanda,

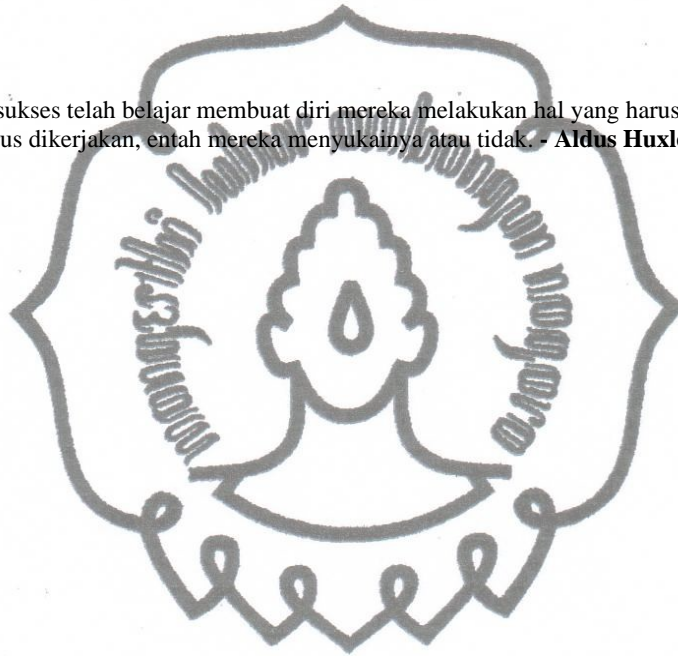
MARTANI SETYAWATI
S4209022

MOTTO

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. - **Nabi Muhammad Saw**

Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. - **Martin Vanbee**

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. - **Aldus Huxley**

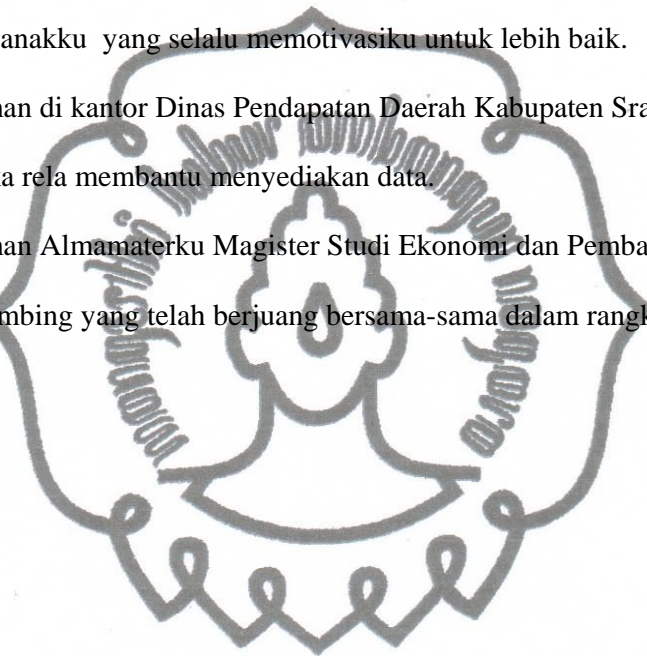


PERSEMBAHAN

Karya Kecil ini aku persembahkan untuk:

Alloh Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta tak lupa ucapan terima kasih buat::

1. Kedua orang tuaku yang tiada henti membimbing dan membesarkanku.
2. Suami dan anakku yang selalu memotivasiku untuk lebih baik.
3. Teman-teman di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen yang telah dengan suka rela membantu menyediakan data.
4. Teman-teman Almamaterku Magister Studi Ekonomi dan Pembangunan yang satu pembimbing yang telah berjuang bersama-sama dalam rangka proses bimbingan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Pemurah atas rahmat dan anugerah yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, terlebih kebatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dalam penyusunan Tesis ini berbagai kendala dihadapi penulis, namun demikian rasanya menjadi ringan ketika ketulusan-ketulusan hadir dari berbagai pihak yang mengulurkan bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Yang telah berkenan memberikan arahan.
2. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Direktur Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret beserta Staf Pengelola.
3. Prof. Dr. Tulus Haryono, M. Ek selaku Pembimbing I yang memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Dra. Izza Mafruhah, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
6. Teman-teman di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Segenap Karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Suami tercinta dan buah hatiku yang telah menyemangati, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk penulis.

10. Teman-teman satu kelompok yang selalu menyemangati, meskipun sering telat sendiri kalianlah yang menjadi semangatku untuk maju.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah membantu keberhasilan penyusunan Tesis ini.

Surakarta, Nopember 2010

Penulis



DAFTAR ISI

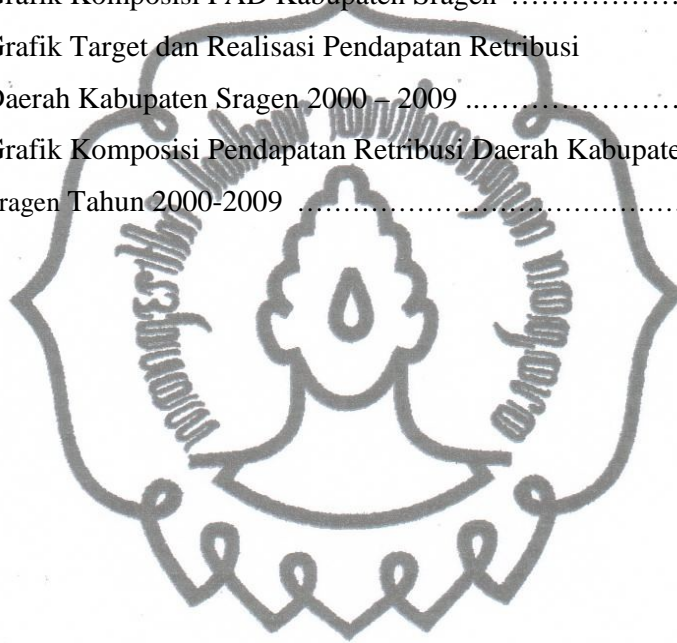
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pendapatan Asli Daerah	6
B. Retribusi Daerah	7
C. Jenis Retribusi	8
BAB III : KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	11
A. Kerangka Pemikiran	11
B. Hipotesis	13
BAB IV : METODE PENELITIAN	18
A. Obyek Penelitian	18
B. Data Penelitian	18
C. Analisis Data	18

D. Definisi Operasional	22
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Penerapan Otonomi Daerah di Kab Sragen	25
B. Deskripsi Data Penelitian	27
1. PAD Tahun 2000-2009	27
2. Retribusi Daerah Tahun 2000-2009	31
C. Analisis Data	38
1. Uji Hipotesis	38
2. Uji Asumsi Klasik	41
D. Pembahasan	44
1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD	44
2. Pengaruh Retribusi Jasa Layanan Umum Terhadap PAD	46
3. Pengaruh Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD	47
4. Pengaruh Retribusi Perijinan Khusus Terhadap PAD	49
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Implikasi Manajerial	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sragen	13
Gambar 5.2 Grafik Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009	29
Gambar 5.3 Grafik Komposisi PAD Kabupaten Sragen	30
Gambar 5.4 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen 2000 – 2009	33
Gambar 5.5 Grafik Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2009	34



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 5.1	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000-2009	29
Tabel 5.2	Komposisi PAD Kabupaten Sragen 2000-2009	30
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000–2009	33
Tabel 5.4	Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Sragen 2000 – 2009	34
Tabel 5.5	Data Kuartal Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009	36
Tabel 5.6	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	39
Tabel 5.7	Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 5.8	Nilai Durbin-Watson	41
Tabel 5.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
Tabel 5.10	Hasil Regresi Linear Berganda pengaruh Variabel Retribusi Atas Jasa Pelayanan Umum (X1), Retribusi Jasa Usaha (X2) Dan Retribusi Perijinan Khusus (X3) terhadap Variabel Dependen PAD (Y)	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	57
Lampiran 2 Data PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009	59
Lampiran 3 Diskriptif Data Penelitian	102
Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	80



ABSTRAK**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN
RETRBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Martani Setyawati
NIM : S 4209022

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009.

Jenis data yang digunakan adalah data data sekunder (*time series*) dengan kurun waktu kuartal dan tahunan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui pengaruh variabel Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Khusus terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 54,9%. 2) Retribusi jasa pelayanan umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi retribusi jasa pelayanan umum terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 48,77 %, 3) Retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata – rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 4,84%, dan 4) Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata – rata kontribusi retribusi jasa perijinan khusus terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 2,54%.

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Pelayanan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Khusus, dan Kabupaten Sragen.

ABSTRACT**ANALYSIS EFFECT OF RETRIBUSI RECEPTION AREA
ON ORIGINAL LOCAL REVENUE IN DISTRICT REGIONAL
SRAGEN****MARTANI SETYAWATI
NIM : S 4209022**

The aims of this study is determine the effect of Retribution on region income Sragen Regency Year 2000-2009.

Types data is secondary (time series) with quarterly and annual period obtained from the Local Revenue Service and the Office of Trade and Taxation Sragen Regency. To determine the effect of variable levies public service, business service levies and levies on real income of the Special Permits (PAD) used multiple linear regression analysis.

The results showed 1) local retribution of public services retribution, business services retribution, special permits retribution affect local revenues (PAD) Sragen Regency in 2000 - 2009 with average contribution on PAD Sragen Regency years of 2000-2009 54.9%. 2) public services retribution affect local revenues (PAD) Sragen Regency in 2000 – 2009, with average contribution on PAD Sragen year 2000-2009 amounted to 48.77%, 3) business services retribution affect local revenues (PAD) Sragen Regency in 2000 – 2009, with average contribution on PAD Sragen year 2000-2009 amounted to 4.84%, and 4) special licensing levies affect local revenues (PAD) Sragen Regency in 2000 – 2009, with average contribution on PAD Sragen year 2000-2009 amounted to 2.54%.

Keywords:

Original Local Revenue (PAD), Local Retribution, Public Services Retribution, Business Services Retribution, Special Permits Retribution, and Sragen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (dalam Sidik et al, 2002).

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada

commit to user

pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pemerintah Pusat (Pempus) akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu :

Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, tetapi juga mencakup disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya aparatur Pemerintah Daerah Kota Sragen) yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang.
3. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Bastian, 2002).

commit to user

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

B. Retribusi Daerah

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibanding dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada

masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- 1) Retibusi dipungut oleh negara
- 2) Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

C. Jenis Retribusi

Retribusi daerah menurut UU nomor 34 tahun 2000 dan PP nomor 66 tahun 2001 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri atas retribusi:

- (1) pelayanan kesehatan
- (2) pelayanan sampah/kebersihan
- (3) penggantian biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akte catatan sipil
- (4) pelayanan pemakaman/pengabuan mayat
- (5) pelayanan parkir di tepi jalan umum

- (6) pelayanan pasar
- (7) pengujian kendaraan bermotor
- (8) pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (9) penggantian biaya cetak peta
- (10) pengujian kapal perikanan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan meng-anut prinsip komersial, artinya retribusi semacam ini dapat disediakan oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi:

- (1) pemakaian kekayaan daerah
- (2) pasar grosir atau pertokoan
- (3) tempat pelelangan
- (4) terminal
- (5) tempat khusus parkir
- (6) tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- (7) penyedotan kakus
- (8) rumah potong hewan (RPH)
- (9) pelayanan pelabuhan kapal
- (10) tempat rekreasi dan olah raga
- (11) penyeberangan di atas air
- (12) pengolahan limbah cair
- (13) penjualan produk usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi yang dikenakan atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas tertentu. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan pra-sarana, atau fasilitas tertentu yang dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain meliputi retribusi:

- (1) Izin mendirikan bangunan (IMB)
- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Izin tempat penjualan obat (toko obat)
- (4) Izin gangguan (HO = Hoereg Ordonantie)
- (5) Izin usaha perdagangan (SIUP)
- (6) Izin tempat usaha (SITU)
- (7) Izin trayek.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Pemikiran

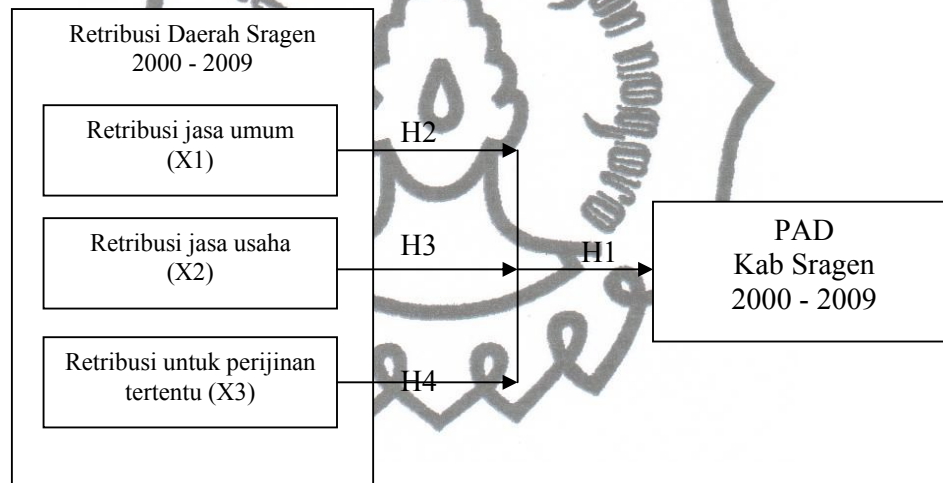
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan

commit to user

merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap Daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk.



Gambar 1
Kerangka Penelitian Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten Sragen Tahun 2000 -2009

Pajak daerah merupakan sumber penghasilan yang universal yang dapat ditemui hampir di semua negara di dunia yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Sedangkan untuk retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari Pemerintah Daerah. Retribusi dibagi atas tiga golongan retribusi, yaitu: (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi untuk perijinan

tertentu. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

B. Hipotesis

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pada hakekatnya pendapatan daerah secara langsung diperoleh dari mekanisme pajak dan retribusi daerah atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horisontal dan kewajaran vertikal.

Prinsip kewajaran horisontal mempersyaratkan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama. Sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya bagi masyarakat berkemampuan membayar tinggi akan dibebankan pajak/retribusi yang tinggi pula. Sudah barang tentu untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan diskriminasi tarif yang rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus

mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar secara relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pengelolaan pelayanan umum. Sehubungan dengan hal itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), (1) pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Dana perimbangan; bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan (3) Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Retribusi daerah menurut UU nomor 34 tahun 2000 dan PP nomor 66 tahun 2001 dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu.

Hasil penelitian Eka, (2000) terhadap kemampuan pembiayaan daerah, khususnya yang berasal dari pos PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi penting, mengingat masih rendahnya sumbangan dari pos PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD. Gambaran data BPS pada tahun 1999/2000 menunjukkan bahwa jumlah APBD untuk tingkat Propinsi secara nasional adalah sebesar Rp 10.576,55 miliar, dengan jumlah total PAD-nya hanya sebesar Rp 3.231,41 miliar (30,55% dari total APBD). Komponen pajak daerah memberikan sumbangan yang terbesar terhadap PAD, yaitu sebesar 83,6%. Sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 8,3%; Laba

BUMD sebesar 3,0%; dan lain-lain PAD sebesar 5,1%. Khusus untuk Jawa Tengah, jumlah total APBD-nya sebesar Rp 640,38 miliar, dengan jumlah total PAD hanya sebesar Rp 237,71 miliar (37,12% dari total APBD Jawa Tengah). Komponen pajak daerah memberikan sumbangan yang terbesar terhadap PAD Jawa Tengah, yaitu sebesar 84,8%. Sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 11,5%; laba BUMD sebesar 0,6%; dan Lain-lain PAD sebesar 3,2%.

Hasil penelitian Mulyanto (2002) dalam kajian terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk pos pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu; memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyusun target pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Hasil penelitian Achmad Lutfi, (2006), menunjukkan bahwa retribusi daerah, merupakan mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu. Hasil penelitian Achmad Lutfi, (2006), menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) digali oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah

ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian Riduansyah (2003), komponen retribusi daerah di Kabupaten Bogor terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44% per tahun. Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,93% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 5,02% per tahunnya.

Hasil analisis Jati (2006) terhadap kontribusi pajak dan retribusi daerah Tingkat II di Jawa Timur menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 70%. Sedangkan dengan statistik induktif metode *one way ANOVA* tidak terdapat perbedaan kontribusi secara signifikan antara daerah Tingkat II di Jawa Timur. Hal ini berarti seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber dominan PAD. Sedangkan pos penerimaan yang lain relatif tidak kurang diperhitungkan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 -2009.
2. Diduga Retribusi jasa umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 -2009.
3. Diduga Retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 -2009.
4. Diduga Retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 -2009.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Kabupaten tahun 2000 – 2009 dengan alasan ketersediaan data.

B. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari informasi dengan teknik dari : (1) Observasi atau Pengamatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen; (2) Wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) dengan aparatur pemerintah Kabupaten Sragen (Bapeda, Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah); dan (3) Dokumentasi berupa gambar/foto-foto lokasi penelitian.

Data sekunder (time series) dengan kurun waktu kuartal dan tahunan yang diperoleh dari, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen dan lembaga-lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

C. Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Khusus terhadap Pendapatan Asli daerah

(PAD) digunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Dengan persamaan regresi linier berganda adalah :

$$PAD = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli daerah

X1 = Retribusi Jasa umum

X2 = Retribusi Jasa Usaha

X3 = Retribusi Perijinan tertentu

a = Konstanta

b₁, b₃ = Koefisien variabel X₁ – X₃

e = Variabel pengganggu

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi (Ghozali, 2005).

a. Uji Normalitas

Dalam menguji normalitas pada penelitian ini digunakan kolmogorov-smirnov. Jika kolmogorov-smirnov hitung lebih besar dari kolmogorov-smirnov tabel maka sebaran data dikatakan mendekati distribusi normal atau normal. Sebaliknya, jika kolmogorov-smirnov hitung lebih kecil dari kolmogorov-smirnov tabel

maka sebaran data dikatakan tidak mendekati distribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2009).

b. Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan bantuan SPSS dilakukan dua tahap, yaitu menghitung nilai residual absolutnya terlebih dahulu baru menghitung korelasi antara nilai variabel dengan nilai residual. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data – data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikansinya (dalam hal ini ditetapkan $\alpha = 5\%$). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari α (5%), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut (Ghozali, 2005).

c. Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 (Ghozali, 2005).

d. Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi hasil pengolahan ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam satu variabel. Konsekuensi dari

autokorelasi adalah biasanya varian dengan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, sehingga nilai R^2 dan F cenderung *overestimated*. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan : nilai DW antara 1,65 sampai 2,35 dapat disimpulkan tidak ada Autokorelasi (Ghozali, 2005).

2. Uji t

Uji ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2009).

3. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

4. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Jika R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik (Ghozali, 2005).

D. Definisi Operasional

1. Pendapatan asli daerah (PAD, Y), yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah Sragen berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri atas retribusi:
 - (1) pelayanan kesehatan
 - (2) pelayanan sampah/kebersihan
 - (3) penggantian biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akte catatan sipil
 - (4) pelayanan pemakaman/pengabuan mayat
 - (5) pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - (6) pelayanan pasar
 - (7) pengujian kendaraan bermotor

- (8) pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - (9) penggantian biaya cetak peta
 - (10) pengujian kapal perikanan.
3. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan meng-anut prinsip komersial, artinya retribusi semacam ini dapat disediakan oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi:
- (1) pemakaian kekayaan daerah
 - (2) pasar grosir atau pertokoan
 - (3) tempat pelelangan
 - (4) terminal
 - (5) tempat khusus parkir
 - (6) tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - (7) penyedotan kakus
 - (8) rumah potong hewan (RPH)
 - (9) pelayanan pelabuhan kapal
 - (10) tempat rekreasi dan olah raga
 - (11) penyeberangan di atas air
 - (12) pengolahan limbah cair
 - (13) penjualan produk usaha daerah.
4. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi yang dikenakan atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas tertentu. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan pra-sarana, atau fasilitas tertentu yang dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain meliputi retribusi:

- (1) Izin mendirikan bangunan (IMB)
- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Izin tempat penjualan obat (toko obat)
- (4) Izin gangguan (HO = Hoereg Ordonantie)
- (5) Izin usaha perdagangan (SIUP)
- (6) Izin tempat usaha (SITU)
- (7) Izin trayek.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah data *time series* (kuartal), berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Retribusi Daerah berupa (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu Kabupaten Sragen tahun 2000 - 2009. Data diambil dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Perdagangan dan Perpajakan daerah Kabupaten Sragen

A. Gambaran Penerapan Otonomi Daerah di Kabupaten Sragen

Menurut UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dampak perubahan yang baik dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Sragen, pembangunan telah dilakukan diberbagai bidang meliputi: pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertahankan dan mengembangkan sektor industri tekstil yang merupakan industri terbesar di Kabupaten Sragen, mengembangkan industri kecil, mempromosikan daerah wisata, meningkatkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan serta potensi lain yang ada. Pembangunan sumberdaya manusia dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai

commit to user

kebijakan, seperti: beasiswa pelajar berprestasi dari Bupati, mendirikan AKPER Yapenas, mencanangkan program pendidikan guru SD (PG SD) dengan biaya pemerintah, meningkatkan kualitas guru SD, SMP, dan SMU (Wajib S1), program GNOTA, insentif bagi guru SD, SMP, dan SMU Negeri, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung DPRD baru, pembangunan perumahan dan pemukiman, pembangunan jalan raya dan perbaikan jalan-jalan desa, penyediaan air bersih, telepon dan listrik, serta infrastruktur lain.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen mengajukan beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengimbangi pembangunan yang telah dilakukan. Perda tersebut mencakup perihal anggaran daerah, pendirian kantor pemerintah baru, rencana strategi pembangunan agribisnis, pendirian Perusahaan Daerah (Perusda), pendirian Badan Perwakilan Desa (BPD), pemeliharaan lingkungan dan peraturan retribusi/pungutan daerah dan lain-lain. Beberapa pajak daerah dan pungutan daerah yang mengalami perkembangan untuk meningkatkan sumber pendapatan antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak hotel dan restoran, retribusi pasar, retribusi terminal, pajak iklan, pungutan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), retribusi parkir, izin gangguan, pajak rekreasi, izin transportasi, pungutan konsultasi medis di Puskesmas dan perijinan trayek.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah dibidang politik, tercermin dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat di DPRD dan Bupati yang dilakukan

secara langsung oleh rakyat. Sebelum penerapan otonomi daerah, Bupati dipilih dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Di era otonomi daerah ini pemilihan langsung oleh rakyat dirasa lebih baik, karna masyarakat mengetahui profil-profil calon pemimpinnya sehingga masyarakat mengetahui kepada siapa mereka menitipkan aspirasi dan pembangunan daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya meningkatkan pungutan terhadap masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sebagai imbal balik dari besarnya pungutan yang diambil. Pelayanan tersebut seperti layanan satu atap terhadap pengurusan surat-surat (KTP, Akta lahir, izin usaha dan lain-lain) dan masyarakat diberi kemudahan untuk mengetahui info-info tentang kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui Sragen website (www.Sragen.go.id).

B. Diskripsi Data Penelitian

2. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2000 – 2009

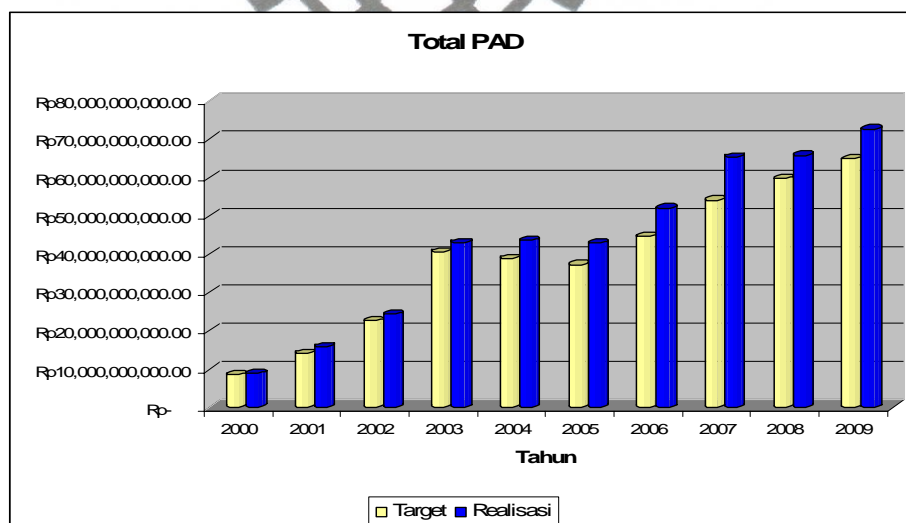
Tabel 4.1 menunjukkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen sejak tahun 2000 sampai tahun 2009. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, realisasi PAD selalu melebihi target yang telah ditentukan dengan prosentase rata – rata realisasi terhadap target sebesar 111,66% dengan variasi dari 103,920% sampai 120,791%. Prosentase realisasi terkecil terjadi pada tahun 2000 dan prosentase realisasi terbesar dicapai pada tahun 2007. Nominal PAD Kabupaten Sragen bervariasi dari Rp 8,876,264,968.00 pada tahun 2000 dan terus mengalami peningkatan tiap tahun sampai pada tahun 2009

mencapai Rp72,681,309,220.00. Hasil ini menunjukkan kinerja dari Dinas Perdagangan dan Pajak Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsinya sudah baik.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sragen 2000 – 2009

NO	TAHUN	TOTAL PAD		
		TARGET	REALISASI	%
1	2000	Rp 8,540,766,000.00	Rp 8,876,264,968.00	103.928
2	2001	Rp 14,163,902,000.00	Rp 15,884,595,560.00	112.148
3	2002	Rp 22,562,309,000.00	Rp 24,347,951,713.00	107.914
4	2003	Rp 40,552,739,000.00	Rp 42,976,691,754.00	105.977
5	2004	Rp 38,800,587,000.00	Rp 43,547,105,781.00	112.233
6	2005	Rp 37,314,968,000.00	Rp 42,848,549,694.00	114.829
7	2006	Rp 44,622,142,000.00	Rp 52,019,759,755.00	116.578
8	2007	Rp 54,025,636,000.00	Rp 65,257,982,596.00	120.791
9	2008	Rp 59,734,994,000.00	Rp 65,803,095,551.00	110.158
10	2009	Rp 64,834,693,656.00	Rp 72,681,309,220.00	112.102

Sumber : Dipenda Sragen (2000 - 2009)



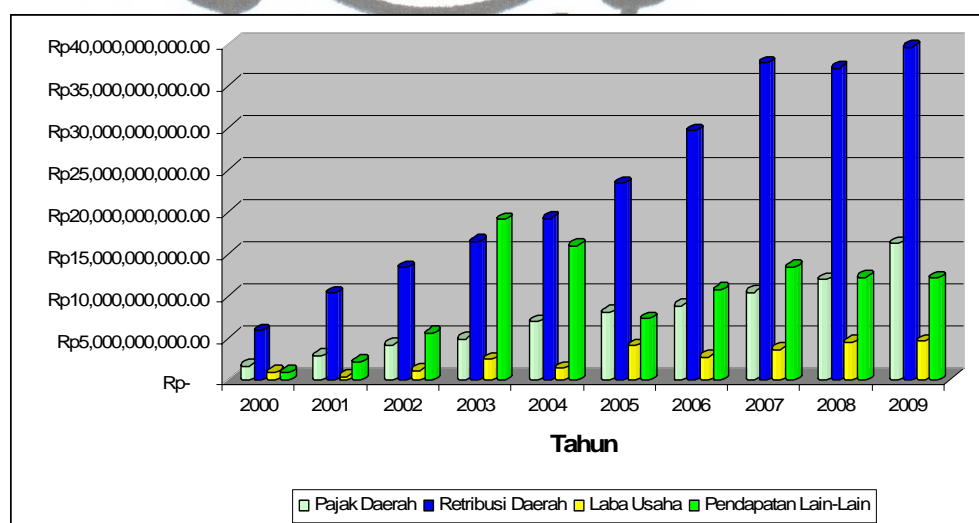
Gambar 2
Grafik Target Dan Realisasi PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 - 2009

Tabel 4.2 menunjukkan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen sejak tahun 2000 sampai tahun 2009.

Tabel 4.2
Komposisi PAD Kabupaten Sragen 2000 – 2009

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH		RETRIBUSI DAERAH		BAGIAN LABA USAHA DAERAH		LAIN-LAIN PENDAPATAN		Total PAD
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2000	Rp 1,705,105,416.00	19.21	Rp 5,856,124,691.00	65.98	Rp 935,468,009.00	10.54	Rp 935,468,009.00	10.54	Rp 8,876,264,968.00
2	2001	Rp 2,921,454,708.00	18.39	Rp10,349,130,636.00	65.15	Rp 424,814,473.00	2.67	Rp 2,189,195,743.00	13.78	Rp 15,884,595,560.00
3	2002	Rp 4,180,028,759.00	17.17	Rp13,421,979,439.00	55.13	Rp 1,173,107,952.00	4.82	Rp 5,572,835,563.00	22.89	Rp 24,347,951,713.00
4	2003	Rp 4,934,428,784.00	11.48	Rp16,475,238,373.00	38.34	Rp 2,503,653,760.00	5.83	Rp 19,063,370,837.00	44.36	Rp 42,976,691,754.00
5	2004	Rp 6,957,120,952.00	15.98	Rp19,228,260,353.00	44.16	Rp 1,382,930,184.00	3.18	Rp 15,978,794,292.00	36.69	Rp 43,547,105,781.00
6	2005	Rp 8,072,127,413.00	18.84	Rp23,408,347,107.00	54.63	Rp 4,102,720,187.00	9.57	Rp 7,265,354,987.00	16.96	Rp 42,848,549,694.00
7	2006	Rp 8,859,374,692.00	17.03	Rp29,640,217,406.00	56.98	Rp 2,755,402,703.00	5.30	Rp 10,764,764,954.00	20.69	Rp 52,019,759,755.00
8	2007	Rp 10,454,239,235.00	16.02	Rp37,682,506,066.00	57.74	Rp 3,678,292,666.00	5.64	Rp 13,442,944,629.00	20.60	Rp 65,257,982,596.00
9	2008	Rp 11,958,348,473.00	18.17	Rp37,083,968,889.00	56.36	Rp 4,504,710,818.00	6.85	Rp 12,256,067,371.00	18.63	Rp 65,803,095,551.00
10	2009	Rp 16,248,229,466.00	22.36	Rp39,619,411,243.00	54.51	Rp 4,662,634,227.00	6.42	Rp 12,151,034,284.00	16.72	Rp 72,681,309,220.00
Rata-Rata		Rp 7,629,045,789.80	17.46	Rp23,276,518,420.30	54.90	Rp 2,612,373,497.90	6.08	Rp 9,961,983,066.90	22.19	Rp 43,424,330,659.20

Sumber : Dipenda Sragen (2000 - 2009)



Gambar 3
Grafik Komposisi PAD Kabupaten Sragen Tahun 2000 - 2009

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, komponen penyumbang PAD Kabupaten Sragen rata-rata terbesar dalam sepuluh tahun terakhir adalah retribusi daerah (54,90%), dan yang paling sedikit adalah laba usaha daerah sebesar (6,08%), sementara pajak daerah menyumbang (17,46%) dan pendapatan lain-lain menyumbang 22,19%.

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa prosentase sumbangan pajak daerah terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2009 sebesar 22,355% dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 11,482%. Realisasi pajak daerah paling besar terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 16,248,229,466.00 dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 1,705,105,416.00.

Prosentase sumbangan retribusi daerah terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2000 yaitu 65,975%, sedangkan sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 38,335%. Realisasi retribusi daerah yang dicapai paling besar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 39,619,411,243.00, sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2000 yaitu Rp 5,856,124,691.00.

Prosentase sumbangan laba usaha daerah terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2000 sebesar 10,539 %, dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2001 yaitu 2,674%. Realisasi laba usaha daerah yang dicapai paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 4,662,634,227.00, sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp 424,814,473.00.

Prosentase sumbangan pendapatan lain-lain terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2003 sebesar 44,357% %, dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2000 yaitu 10,539%. Realisasi pendapatan lain-lain yang dicapai paling besar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 19,063,370,837.00 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp 935,468,009.00.

3. Retribusi Daerah Tahun 2000 – 2009

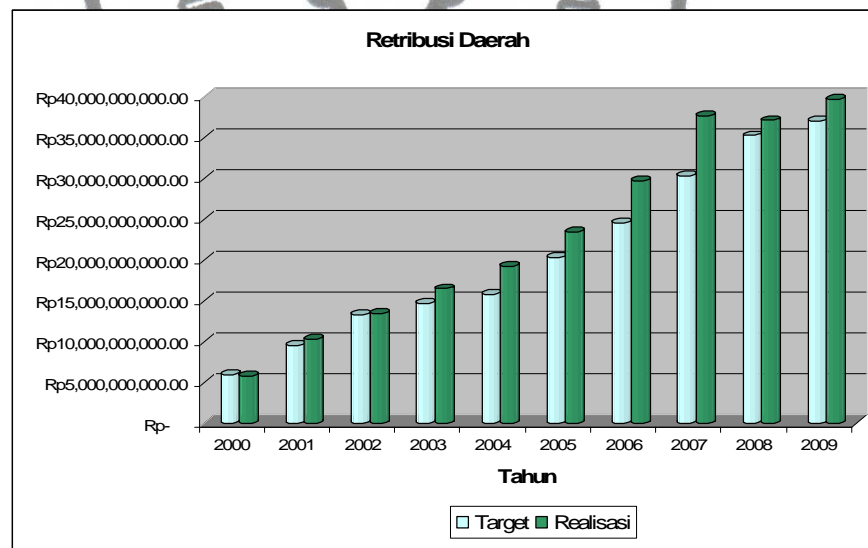
Tabel 4.3 menunjukkan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Sragen sejak tahun 2000 sampai tahun 2009. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, realisasi retribusi daerah selalu melebihi target yang telah ditentukan dengan prosentase rata – rata realisasi terhadap target sebesar 111,488%. Target realisasi pendapatan dari retribusi daerah yang tidak tercapai hanya pada tahun 2000 yaitu 98%. Prosentase realisasi terbesar terjadi tahun 2007 mencapai 124,466%.

Realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Sragen bervariasi dari Rp 5,856,124,691.00 pada tahun 2000 dan terus mengalami peningkatan tiap tahun sampai pada tahun 2009 dapat mencapai Rp 39,619,411,243.00. Hasil ini menunjukkan kinerja dari Dinas Perdagangan dan Pajak Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsinya sudah baik.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sragen 2000 – 2009

NO	TAHUN	RETRIBUSI DAERAH		
		TARGET	REALISASI	%
1	2000	Rp 5,935,644,000.00	Rp 5,856,124,691.00	98.660
2	2001	Rp 9,582,490,000.00	Rp 10,349,130,636.00	108.000
3	2002	Rp 13,260,925,000.00	Rp 13,421,979,439.00	101.215
4	2003	Rp 14,702,762,000.00	Rp 16,475,238,373.00	112.055
5	2004	Rp 15,766,801,000.00	Rp 19,228,260,353.00	121.954
6	2005	Rp 20,284,669,000.00	Rp 23,408,347,107.00	115.399
7	2006	Rp 24,549,965,000.00	Rp 29,640,217,406.00	120.734
8	2007	Rp 30,275,375,000.00	Rp 37,682,506,066.00	124.466
9	2008	Rp 35,210,044,000.00	Rp 37,083,968,889.00	105.322
10	2009	Rp 37,002,178,689.00	Rp 39,619,411,243.00	107.073

Sumber : Dipenda Sragen (2000 - 2009)



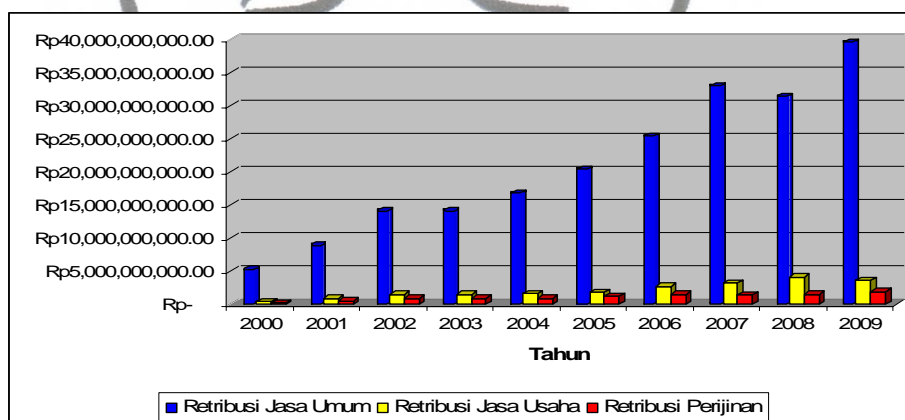
Gambar 4
Grafik Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2000 – 2009

Tabel 4.4 menunjukkan komposisi realisasi retribusi daerah dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen sejak tahun 2000 sampai tahun 2009.

Tabel 4.4
Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD
Kabupaten Sragen 2000 – 2009

NO	TAHUN	Retribusi Jasa Umum		Retribusi Jasa Usaha		Retribusi Perijinan		PAD
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2000	Rp 5,258,331,636.00	59.24	Rp 393,576,114.00	4.43	Rp 204,216,941.00	2.30	Rp 8,876,264,968.00
2	2001	Rp 8,950,059,211.00	56.34	Rp 946,927,564.00	5.96	Rp 452,143,861.00	2.85	Rp 15,884,595,560.00
3	2002	Rp 14,106,248,753.00	51.48	Rp 1,450,823,671.00	5.29	Rp 918,165,949.00	3.35	Rp 27,401,210,647.00
4	2003	Rp 14,106,248,753.00	32.82	Rp 1,450,823,671.00	3.38	Rp 918,165,949.00	2.14	Rp 42,976,691,754.00
5	2004	Rp 16,779,862,454.00	38.53	Rp 1,573,872,688.00	3.61	Rp 874,525,211.00	2.01	Rp 43,547,105,781.00
6	2005	Rp 20,378,821,620.00	47.56	Rp 1,817,506,925.00	4.24	Rp 1,212,018,562.00	2.83	Rp 42,848,549,694.00
7	2006	Rp 25,412,555,291.00	48.85	Rp 2,746,068,887.00	5.28	Rp 1,481,593,228.00	2.85	Rp 52,019,759,755.00
8	2007	Rp 33,026,169,950.00	50.61	Rp 3,240,236,085.00	4.97	Rp 1,416,100,031.00	2.17	Rp 65,257,982,596.00
9	2008	Rp 31,414,806,716.00	47.74	Rp 4,142,920,373.00	6.30	Rp 1,526,241,800.00	2.32	Rp 65,803,095,551.00
10	2009	Rp 39,619,411,243.00	54.51	Rp 3,580,103,701.00	4.93	Rp 1,892,480,757.00	2.60	Rp 72,681,309,220.00
Rata-Rata		Rp 20,905,251,562.70	48.77	Rp 2,134,285,967.90	4.84	Rp 1,089,565,228.90	2.54	Rp 43,729,656,552.60

Sumber : Dipenda Sragen (2000 - 2009)



Gambar 5
Grafik Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2000 - 2009

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, komponen retribusi daerah penyumbang PAD Kabupaten Sragen rata-rata terbesar dalam sepuluh tahun terakhir adalah retribusi daerah jasa pelayanan umum

commit to user

(48,77%), dan yang paling sedikit adalah pendapatan retribusi perijinan khusus (2,54%), sementara kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD sebesar (4,84%).

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 5 dapat diketahui bahwa prosentase kontribusi retribusi jasa pelayanan umum terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2000 sebesar 59,24% dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2003 sebesar 32,82%. Realisasi retribusi jasa pelayanan umum paling besar terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 39,619,411,243.00 dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 5,258,331,636.00.

Prosentase kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu 6,30%, sedangkan sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 3,38%. Realisasi retribusi jasa usaha yang dicapai paling besar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 4,142,920,373.00 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2000 yaitu Rp 393,576,114.00.

Prosentase kontribusi retribusi perijinan khusus terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2001 dan 2006 sebesar 2,85 %, dan yang paling kecil terjadi pada tahun 2003 yaitu 2,01%. Realisasi retribusi perijinan khusus yang dicapai paling besar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 1,892,480,757.00, sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 204,216,941.00.

Tabel 4.5
Data Kuartal Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2000 – 2009

NO	TAHUN	KUAR TAL	BULAN	Ret. J UMUM	Ret. J USAHA	Ret. Perijinan	PAD
1	2000	I	Maret	Rp 1,104,249,700.00	Rp 86,586,700.00	Rp 46,969,800.00	Rp 2,041,540,900.00
2		II	Juni	Rp 1,367,166,200.00	Rp 102,329,700.00	Rp 51,054,200.00	Rp 2,307,828,000.00
3		III	September	Rp 1,261,999,600.00	Rp 90,522,500.00	Rp 51,054,200.00	Rp 2,130,303,500.00
4		IV	Desember	Rp 1,524,916,200.00	Rp 114,137,000.00	Rp 55,138,500.00	Rp 2,396,591,500.00
5	2001	I	Maret	Rp 1,879,512,500.00	Rp 217,793,300.00	Rp 94,950,200.00	Rp 3,494,611,000.00
6		II	Juni	Rp 2,595,517,200.00	Rp 255,670,400.00	Rp 131,121,700.00	Rp 4,606,532,700.00
7		III	September	Rp 2,148,014,200.00	Rp 236,731,800.00	Rp 108,514,500.00	Rp 3,653,456,900.00
8		IV	Desember	Rp 2,327,015,400.00	Rp 236,731,900.00	Rp 117,557,400.00	Rp 4,129,994,800.00
9	2002	I	Maret	Rp 3,808,687,200.00	Rp 420,738,800.00	Rp 266,268,100.00	Rp 7,672,338,900.00
10		II	Juni	Rp 3,244,437,200.00	Rp 304,672,900.00	Rp 201,996,500.00	Rp 6,028,266,300.00
11		III	September	Rp 3,526,562,200.00	Rp 348,197,600.00	Rp 211,178,100.00	Rp 6,576,290,500.00
12		IV	Desember	Rp 3,526,562,200.00	Rp 377,214,100.00	Rp 238,723,100.00	Rp 7,124,314,700.00
13	2003	I	Maret	Rp 3,103,374,700.00	Rp 333,689,400.00	Rp 201,996,500.00	Rp 9,025,105,200.00
14		II	Juni	Rp 4,090,812,100.00	Rp 391,722,300.00	Rp 257,086,400.00	Rp 12,463,240,600.00
15		III	September	Rp 3,667,624,700.00	Rp 362,705,900.00	Rp 238,723,100.00	Rp 11,173,939,800.00
16		IV	Desember	Rp 3,244,437,200.00	Rp 362,705,900.00	Rp 220,359,800.00	Rp 10,314,406,000.00
17	2004	I	Maret	Rp 3,691,569,700.00	Rp 330,513,200.00	Rp 192,395,500.00	Rp 10,015,834,300.00
18		II	Juni	Rp 4,362,764,200.00	Rp 409,206,800.00	Rp 227,376,500.00	Rp 10,886,776,400.00
19		III	September	Rp 4,866,160,100.00	Rp 456,423,000.00	Rp 244,867,000.00	Rp 11,757,718,500.00
20		IV	Desember	Rp 3,859,368,300.00	Rp 377,729,400.00	Rp 209,886,000.00	Rp 10,886,776,400.00
21	2005	I	Maret	Rp 5,298,493,600.00	Rp 472,551,800.00	Rp 30,300,400.00	Rp 11,140,622,900.00
22		II	Juni	Rp 4,483,340,700.00	Rp 381,676,400.00	Rp 278,764,200.00	Rp 9,426,680,900.00
23		III	September	Rp 5,706,070,000.00	Rp 527,077,000.00	Rp 327,245,000.00	Rp 12,426,079,400.00
24		IV	Desember	Rp 4,890,917,200.00	Rp 436,201,700.00	Rp 303,004,600.00	Rp 9,855,166,400.00
25	2006	I	Maret	Rp 5,590,762,000.00	Rp 604,135,100.00	Rp 311,134,500.00	Rp 11,964,544,700.00
26		II	Juni	Rp 7,369,641,000.00	Rp 659,056,500.00	Rp 385,214,200.00	Rp 13,004,939,900.00
27		III	September	Rp 5,844,887,700.00	Rp 713,977,900.00	Rp 355,582,300.00	Rp 13,004,939,900.00
28		IV	Desember	Rp 6,607,264,400.00	Rp 768,899,200.00	Rp 429,662,000.00	Rp 14,045,335,100.00
29	2007	I	Maret	Rp 9,247,327,000.00	Rp 874,863,700.00	Rp 410,669,000.00	Rp 18,924,814,900.00
30		II	Juni	Rp 8,586,804,200.00	Rp 810,059,000.00	Rp 368,186,000.00	Rp 16,967,075,400.00
31		III	September	Rp 7,265,757,400.00	Rp 745,254,300.00	Rp 297,381,000.00	Rp 14,356,756,100.00
32		IV	Desember	Rp 7,926,280,800.00	Rp 810,059,000.00	Rp 339,864,000.00	Rp 15,009,335,000.00
33	2008	I	Maret	Rp 9,110,293,900.00	Rp1,118,588,500.00	Rp 427,347,704.00	Rp 19,082,897,700.00
34		II	Juni	Rp 6,597,109,400.00	Rp 952,871,600.00	Rp 335,773,196.00	Rp 14,476,681,000.00
35		III	September	Rp 8,167,849,700.00	Rp1,035,730,000.00	Rp 366,298,032.00	Rp 17,108,804,800.00
36		IV	Desember	Rp 7,539,553,600.00	Rp1,035,730,000.00	Rp 396,822,868.00	Rp 15,134,711,900.00
37	2009	I	Maret	Rp 9,508,658,700.00	Rp 823,423,800.00	Rp 492,044,900.00	Rp 18,170,327,300.00
38		II	Juni	Rp11,489,629,300.00	Rp 930,826,900.00	Rp 454,195,300.00	Rp 18,170,327,300.00
39		III	September	Rp 8,320,076,400.00	Rp 787,622,800.00	Rp 416,345,700.00	Rp 16,716,701,100.00
40		IV	Desember	Rp10,301,046,900.00	Rp1,038,230,000.00	Rp 529,894,600.00	Rp 19,623,953,400.00
Rata - Rata				Rp 5,226,312,800.00	Rp 533,571,500.00	Rp 272,391,300.00	Rp 10,932,414,050.00

Sumber : Dipenda Sragen (2000 - 2009)

commit to user

Tabel 4.5 menunjukkan komposisi realisasi retibusi daerah dan Kabupaten Sragen sejak tahun 2000 sampai tahun 2009 berupa data kuartal (tiga bulanan).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa retribusi jasa pelayanan umum paling besar didapatkan pada kuartal II (Juni) 2009 yaitu sebesar Rp 11.489.629.200,00 sedangkan yang terkecil terjadi pada kuartal I (Maret) 2000 yaitu sebesar Rp 1.104.249.600,00. Retribusi atas jasa pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan berasal dari retribusi 1) pelayanan kesehatan, 2) pelayanan sampah/kebersihan, 3) penggantian biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akte catatan sipil, 5) pelayanan pemakaman/pengabuan mayat, 6) pelayanan parkir di tepi jalan umum, 7) pelayanan pasar, 8) pengujian kendaraan bermotor, 9) pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 10) penggantian biaya cetak peta, dan 11) pengujian kapal perikanan.

Retribusi jasa usaha paling besar dicapai pada kuartal I (Maret) 2008 yaitu sebesar Rp 1.118.588.500,00 sedangkan yang terkecil terjadi pada kuartal I (Maret) 2000 yaitu sebesar Rp 86.586.700.00. Retribusi jasa usaha ini merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan meng-anut prinsip komersial, artinya retribusi semacam ini dapat disediakan oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha yang diperoleh dari retribusi 1) pemakaian kekayaan

commit to user

daerah, 2) pasar grosir atau pertokoan, 3) tempat pelelangan, 4) terminal, 5) tempat khusus parkir, 6) tempat penginapan/pesanggrahan/vila, 7) penyedotan kakus, 8) rumah potong hewan (RPH), 9) pelayanan pelabuhan kapal, 10) tempat rekreasi dan olah raga, 11) penyeberangan di atas air, 12) pengolahan limbah cair dan 13) penjualan produk usaha daerah.

Retribusi perijinan khusus paling besar dicapai pada kuartal I (Maret) 2009 yaitu sebesar Rp 1.118.588.500,00 sedangkan yang terkecil terjadi pada kuartal II (Juni) 2008 yaitu sebesar Rp 49.2045.000,00. Retribusi perijinan khusus merupakan retribusi yang dikenakan atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas tertentu. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan pra-sarana, atau fasilitas tertentu yang dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan khusus tersebut meliputi retribusi 1) Izin mendirikan bangunan (IMB), 2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol, 3) Izin tempat penjualan obat (toko obat), 4) Izin gangguan (HO = *Hoereg Ordonantie*), 5) Izin usaha perdagangan (SIUP), 6) Izin tempat usaha (SITU) dan 7) Izin trayek.

C. Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Pengaruh – pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian digunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi dalam menguji hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen Retribusi jasa pelayanan umum (X1), Retribusi jasa usaha (X2) dan Retribusi perijinan khusus (X3) terhadap variabel dependen PAD (Y).

Tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda variabel independen Dana Pihak Ketiga (X1), CAR (X2) dan NPLs (X3) terhadap variabel dependen kredit investasi (Y1).

Tabel 4.6

Hasil regresi linear berganda pengaruh variabel Retribusi atas jasa pelayanan umum (X1), Retribusi jasa usaha (X2) dan Retribusi perijinan khusus (X3) terhadap variabel dependen PAD (Y)

variabel independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	791893968	555148720		1.426	0.162
Retribusi jasa pelayanan umum	0.748	0.323	0.393	2.320	0.026*
Retribusi jasa usaha	15.305	5.787	0.372	2.645	0.012*
Retribusi perijinan khusus	3.863	2.389	0.220	2.462	0.015*
F hitung		159.524	R Square		0.930
Sinifikansi		0.000	Adjusted R Square		0.924
R		0.964	Dependent Variable: PAD (Y)		

*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 persamaan regresi linear yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 791893968 + 0.748X_1 + 15.305X_2 + 3.863 X_3 + e$$

Dari hasil perhitungan diatas, hasil pengujian hipotesis untuk variabel dependen kredit modal kerja menunjukkan :

- a. Pengaruh Retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi jasa pelayanan umum (X_1), Retribusi jasa usaha (X_2) dan Retribusi perijinan khusus (X_3) secara serempak terhadap PAD Kabupaten Sragen periode 2000 – 2009 adalah signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} (159,524) lebih besar dari F_{tabel} ($\pm 4,96$), dan nilai signifikansinya (0,00) lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini menjadikan hipotesis 1 (satu) dalam penelitian ini diterima.
- b. Pengaruh retribusi jasa pelayanan umum (X_1) terhadap PAD Kabupaten Sragen periode 2000 – 2009 adalah signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (2.320) lebih besar dari t_{tabel} ($\pm 1,96$), dengan signifikansi 0,026 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi retribusi jasa pelayanan umum sebesar 0,748 artinya jika nilai variabel retribusi jasa pelayanan umum meningkat sebesar satu juta rupiah sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel PAD sebesar 0,748 juta rupiah.
- c. Pengaruh retribusi jasa usaha (X_2) terhadap PAD Kabupaten Sragen periode 2000 – 2009 adalah signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (2.645) lebih besar dari t_{tabel} ($\pm 1,96$), dengan signifikansi 0,012

yang berarti lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi retribusi jasa usaha sebesar 15.305 artinya jika nilai variabel retribusi jasa pelayanan umum meningkat sebesar satu juta rupiah sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel PAD sebesar 15.305 juta rupiah. Kondisi ini menjadikan hipotesis 3 (tiga) dalam penelitian ini diterima.

- d. Pengaruh retribusi perijinan khusus (X3) terhadap PAD Kabupaten Sragen periode 2000 –2009 adalah signifikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (2.462) lebih besar dari t_{tabel} ($\pm 1,96$), dengan signifikansi 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi retribusi jasa pelayanan umum sebesar 3.863 artinya jika nilai variabel retribusi jasa pelayanan umum meningkat sebesar satu juta rupiah sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel PAD sebesar 3.863 juta rupiah. Kondisi ini menjadikan hipotesis 4 (empat) dalam penelitian ini diterima.
- e. Koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda diatas sebesar 0,964, hal ini menunjukkan bahwa model dari Retribusi jasa pelayanan umum (X1), Retribusi jasa usaha (X2) dan Retribusi perijinan khusus (X3) secara serempak dapat menjelaskan terhadap varian PAD Kabupaten Sragen periode 2000 – 2009 sebesar 96,4%, sedangkan 3,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, sebelum melakukan regresi linier berganda harus dipenuhi atau terbebas dari asumsi klasik, maka untuk mengetahui hal tersebut, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik tersebut antara lain normalitas, multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, sebelum melakukan regresi linier berganda harus diketahui faktor pengganggu atau residualnya berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96076892
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.870
Asymp. Sig. (2-tailed)		.435

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder diolah (2010)

Berdasarkan Uji *Kolmogorov Smirnov* pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Hal

commit to user

tersebut diketahui dari Nilai K-S untuk residual PAD sebesar 0,870 dengan probabilitas signifikansi 0,435 jauh diatas $\alpha = 0.05$, jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Multikolineraitas

Uji multikolineritas dalam penelitian ini dideteksi dengan nilai *Tolerance* dan VIF. Pada Tabel 4.8 ditunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki *Tolerance* kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10,00, yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel		Tolerance	VIF
Dependen	Independen		
PAD	Retribusi atas jasa pelayanan umum	0.677	4.766
	Retribusi jasa usaha	0.837	4.165
	Retribusi perijinan khusus	0.120	1.950

Sumber : data sekunder diolah (2010)

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW). Nilai DW pada penelitian ini sebesar 2,507 (Tabel 4.9) untuk variabel dependen PAD.

commit to user

Tabel 4.9
Nilai Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 ^a	.930	.924	1446541303	2.507

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data sekunder diolah (2010)

Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel (40) dan jumlah variabel independen ($k = 3$), tabel Durbin Watson menunjukkan nilai $dl = 1.48$ dan nilai $du = 1.69$. Oleh karena nilai DW 2,507 lebih besar dari batas atas (du) 1.457 dan lebih kecil dari $4 - 1.457$ (2.54), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi karena nilai DW tersebut terletak di daerah *no autocorrelations*.

d. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Uji yang harus dilakukan selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser yaitu meregresikan nilai residual yang diperoleh dengan variabel-variabel independennya. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel		t_{hitung}	Sig
Dependen	Independen		
Residual_PAD	Retribusi atas jasa pelayanan umum	-0.139	0.890
	Retribusi jasa usaha	-1.341	0.188
	Retribusi perijinan khusus	1.036	0.307

Sumber : data sekunder diolah (2010)

Hasil regresi residual dengan variabel independen menunjukkan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel (1,96) atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Temuan pertama dalam penelitian ini adalah retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009.

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 merupakan yang paling besar dibandingkan kontribusi pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 54,9 %. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi

daerah merupakan pendapatan asli daerah yang sangat penting di Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) yang menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap Daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk. Pajak daerah merupakan sumber penghasilan yang universal yang dapat ditemui hampir di semua negara di dunia yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Sedangkan untuk retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari Pemerintah Daerah. Retribusi dibagi atas tiga golongan

retribusi, yaitu: (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi untuk perijinan tertentu.

2. Pengaruh Retribusi Jasa Pelayanan Umum Terhadap PAD

Temuan kedua dalam penelitian ini adalah retribusi jasa pelayanan umum yang terdiri dari retribusi 1) pelayanan kesehatan, 2) pelayanan sampah/kebersihan, 3) penggantian biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akte catatan sipil, 5) pelayanan pemakaman/pengabuan mayat, 6) pelayanan parkir di tepi jalan umum, 7) pelayanan pasar, 8) pengujian kendaraan bermotor, 9) pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 10) penggantian biaya cetak peta, dan 11) pengujian kapal perikanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009.

Rata – rata kontribusi retribusi jasa pelayanan umum terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 merupakan yang paling besar dibandingkan kontribusi retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan khusus, yaitu sebesar 48,77 %. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa pelayanan umum merupakan komponen retribusi daerah yang sangat penting di Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Eka, (2000) tentang kemampuan pembiayaan daerah, khususnya yang berasal dari pos PAD (Pendapatan Asli Daerah) di wilayah Jawa tengah berasal dari kontribusi retribusi daerah berupa retribusi jasa pelayanan umum.

Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Mulyanto (2002) dalam kajian terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk pos pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu; memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyusun target pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Riduansyah (2003), tentang komponen retribusi daerah di Kabupaten Bogor terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44% per tahun. Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,93% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 5,02% per tahunnya.

3. Pengaruh Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD

Temuan ketiga dalam penelitian ini adalah retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi: 1) pemakaian kekayaan daerah, 2) pasar grosir atau pertokoan, 3) tempat pelelangan, 4) terminal, 5) tempat khusus parkir, 6) tempat penginapan/pesanggrahan/vila, 7) penyedotan kakus, 8) rumah

potong hewan (RPH), 9) pelayanan pelabuhan kapal, 10) tempat rekreasi dan olah raga, 11) penyeberangan di atas air, 12) pengolahan limbah cair dan 13) penjualan produk usaha daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009.

Rata – rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 4,84%. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha merupakan komponen retribusi daerah yang tidak dapat diabaikan di Kabupaten Sragen.

Hasil ini mendukung penelitian Achmad Lutfi, (2006), yang menunjukkan menunjukkan bahwa retribusi daerah, merupakan mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha dan (3) Retribusi perizinan tertentu. Hasil penelitian Achmad Lutfi, (2006), menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) digali oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah yang salah satunya adalah retribusi jasa usaha, bagian daerah yang

berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4. Pengaruh Retribusi Perijinan Khusus Terhadap PAD

Temuan keempat dalam penelitian ini adalah retribusi perijinan khusus yang terdiri dari retribusi: 1) Izin mendirikan bangunan (IMB), 2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol, 3) Izin tempat penjualan obat (toko obat), 4) Izin gangguan (HO = *Hoereg Ordonantie*), 5) Izin usaha perdagangan (SIUP), 6) Izin tempat usaha (SITU) dan 7) Izin trayek berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009.

Rata – rata kontribusi retribusi jasa perijinan khusus terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 2,54%. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun relatif kecil dibandingkan kontribusi retribusi daerah yang lain, akan tetapi retribusi perijinan khusus merupakan komponen yang cukup penting untuk terus dikembangkan di Kabupaten Sragen.

Hasil analisis Jati (2006) terhadap kontribusi pajak dan retribusi daerah Tingkat II di Jawa Timur menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 70%. Sedangkan dengan statistik induktif metode *one way ANOVA* tidak terdapat perbedaan kontribusi secara signifikan antara daerah Tingkat II di Jawa Timur. Hal ini berarti seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur mengandalkan

pajak dan retribusi daerah berupa retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan khusus sebagai sumber dominan PAD.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 adalah yang paling besar dibandingkan kontribusi pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun pendapatan lain-lain. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 54,90%, kontribusi laba usaha daerah sebesar (6,08%), kontribusi pajak daerah menyumbang (17,46%) dan kontribusi pendapatan lain-lain sebesar 22,19%.
2. Retribusi jasa pelayanan umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi retribusi jasa pelayanan umum terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 merupakan yang paling besar dibandingkan kontribusi retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan khusus, yaitu sebesar 48,77 %.
3. Retribusi jasa usaha yang terdiri berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi

retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 4,84%.

4. Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi retribusi jasa perijinan khusus terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 2,54%.

B. Implikasi manajerial

Adapun implikasi praktis yang dapat diberikan agar hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian di atas dapat antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD maka pemerintah daerah harus benar-benar menggali potensi yang dimiliki oleh daerah yang dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan retribusi. Misalnya ketegasan dalam retribusi parkir ditepi di jalan yang banyak mengalami penurunan, yaitu dapat dilakukan dengan menetapkan retribusi parkir untuk pemilik mobil yang hanya memarkir mobilnya dipinggir jalan dimana mereka tidak mempunyai tempat parkir sendiri atau halaman dirumahnya maka dikenakan retribusi parkir dengan tarif permalam.
2. Agar tingkat pencapaian target retribusi daerah lebih efektif lagi maka pemerintah daerah diwajibkan untuk benar-benar memungut seluruh potensi yang ada sehingga realisasi yang akan diterima sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sebab, terkadang ada suatu potensi atau

asset yang harus diwajibkan membayar retribusi tetapi tidak dipungut atau terlewatkan sehingga realisasi yang diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebelumnya.

3. Pemerintah daerah dituntut untuk benar-benar memperhatikan dalam setiap pemungutan potensi retribusi daerah yang ada. Misalnya jangan mengabaikan wajib retribusi yang hanya memberikan masukan yang kecil, karena hal ini akan berpengaruh pada penerimaan PAD. Jadi semakin besar penerimaan retribusi daerah maka semakin besar pula PAD yang akan diterimanya. Sehingga peningkatan retribusi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan PAD atau dapat dikatakan retribusi daerah bersifat elastis terhadap PAD.